

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENERIMA MANFAAT DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS MARSUDI PUTRA SURABAYA

¹Aprilia Rosa, ²Rachmawati Novaria, ³Eddy Wahyudi

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

¹apriliosaseingo@gmail.com, ²nova@untag-sby.ac.id, ³eddy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 merupakan perancangan yang dibuat untuk menyusun rangkaian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya dipilih sebagai salah satu unit yang membina Anak Nakal selaku Penerima Manfaat dengan menganalisis dari sisi pembinaan perubahan perilaku. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penerima Manfaat Di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi model Merilee S. Grindle dengan melihat isi kebijakan dan Konteks kebijakan melalui faktor-faktor sebagai dasar menganalisis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya telah melaksanakan pembinaan dan menyalurkan bantuan sosial berupa perlengkapan keterampilan bagi penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak lebih dari 74 eks klien setiap tahunnya dari kebijakan Peraturan Gubernur ditetapkan pada 2018. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya telah mengimplementasikan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial berupa pembinaan kepada penerima manfaat dalam hal kewirausahaan melalui kebijakan yang telah dijalankan. Faktanya melalui teori Merilee S. Grindle konteks kebijakan menunjukkan bahwa UPT memiliki strategi berupa Rencana Operasional Kegiatan dan kekuasaan aktor yang terlibat dari Dinas sosial Provinsi Jawa Timur namun isi kebijakan ditemukan adanya ketidak sesuaian pada letak pengambilan keputusan yaitu kelompok sasaran penerima manfaat dan sumber daya yang dikerahkan tidak sesuai dengan jumlah target pembinaan penerima manfaat

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

Abstract

Governor Regulation Number 85 of 2018 is a design made to compile a series of tasks and functions and work procedures for the Regional Technical Implementation Unit of the East Java Provincial Social Service. The Marsudi Putra Surabaya Technical Implementation Unit was chosen as one of the units that fosters Delinquents as Beneficiaries by analyzing from a behavioral change coaching perspective. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of social protection and rehabilitation policies for beneficiaries at the Marsudi Putra Technical Implementation Unit in Surabaya. factors as the basis for analyzing. The results of this study found that the Marsudi Putra Surabaya

Technical Implementation Unit has carried out coaching and distributed social assistance in the form of skills equipment for beneficiaries in accordance with the applicable provisions of more than 74 ex-clients each year from the Governor's Regulation policy established in 2018. Conclusion The results obtained from this study are that the Marsudi Putra Surabaya Technical Implementation Unit has implemented its duties to provide social protection and rehabilitation in the form of coaching to beneficiaries in terms of entrepreneurship through policies that have been implemented. In fact, through Merilee S. Grindle's theory, the policy context shows that the UPT has a strategy in the form of an Operational Plan of Activities and the powers of the actors involved from the East Java Provincial Social Service, but the content of the policy is found to be incompatible with the location of decision making, namely the target group of beneficiaries and the resources deployed. not in accordance with the target number of beneficiary coaching.

Keywords: Implementation, Policy, Social Protection and Rehabilitation.
PENDAHULUAN

Situasi saat ini, khususnya keberadaan anak, sangat penting bagi keberhasilan bangsa di masa depan karena anak memegang peranan penting dalam kelangsungan perkembangan bangsa dan negara. Jika anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuan terbaiknya, mereka dapat menjadi sumber perkembangan. Anak yang mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan masyarakat dan bangsa.

Dapat dipastikan sumber daya manusia masa depan akan cukup berkualitas jika saat ini banyak anak yang hidup berkecukupan jasmani, rohani, dan sosial secara utuh. Sumber daya manusia yang disebut berkualitas yaitu cerdas, kreatif, dan mandiri. Faktanya, banyak anak tidak dapat mengatasi masalah mereka dan mengalami masalah sosial, Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi atau faktor, seperti panti asuhan, kondisi

ekonomi keluarga yang kurang mampu, atau keluarga yang putus atau bercerai. sehingga anak tidak dapat menormalkan perkembangan jasmani, rohani, dan sosialnya. Setiawan, (2021)

Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui peraturan gubernur No. 85 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, susunan, tugas dan fungsi UPT yang dituliskan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial (2021) mempertegas bahwa keberadaan UPT Marsudi Putra Surabaya yaitu sebagai tempat yang dapat memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak penerima manfaat dari ancaman fisik dan psikis dari berbagai pihak, serta pemulihan sosial melalui rehabilitasi, memungkinkan anak berperilaku normatif. Dengan mengembangkan potensi untuk memberikan keterampilan hidup dan usaha yang diharapkan mampu menghasilkan pendapatan sesuai dengan kemampuannya.

Tujuan dilaksanakan bimbingan kewirausahaan pada anak nakal yang ditempatkan di UPT ini. Sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, khususnya sesuai dengan bidang yang diminati kemampuan anak UPT menawarkan 2 jenis keterampilan yaitu otomotif dan las dengan maksud anak-anak yang keluar dari UPT dapat melanjutkan kehidupan agar tidak bergantung kepada orang lain. Selain memberikan bimbingan sosial kewirausahaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT Marsudi Putra Surabaya memberikan bantuan barang berupa peralatan usaha khusus kepada Anak Nakal karena masuk kategori rentan. Berbeda dengan Anak Berhadapan dengan Hukum yang diberikan pelayanan, pendampingan, perawatan, pembinaan anak dengan tujuan anak-anak tersebut dapat berubah dan menjalankan kehidupan yang layak dengan Hak yang mereka miliki.

Dalam memahami pelaksanaan pendekatan pelaksanaan pedoman perwakilan pimpinan no. 85 Tahun 2018. Menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980), “isi” dan “konteks” kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Content atau isi kebijakan :

1. *Interest affected* (Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan)

2. *Type of benefits* (Jenis Manfaat yang dihasilkan)
3. *Extent of change envisioned* (Derajat perubahan yang diinginkan)
4. *Site of decision making* (Kedudukan pembuat kebijakan)
5. *Program implementors* (Para pelaksana program)
6. *Resources committed* (Sumber daya yang dikerahkan)

Context atau Konteks kebijakan, terdiri dari :

1. Power, interests, and strategies of actor involved (Kekuatan, strategi actor yang terlibat)
2. Institution and regime characteristics (Karakteristik lembaga dan penguasa)
3. Compliance and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana).

METODE

Metode penelitian menggunakan kualitatif Sugiyono (2021:7) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu, metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Kenakalan remaja sering kali membuat resah para orangtua banyak penyebab yang mengubah karakter anak terjadinya pemicu perubahan perilaku anak disebabkan oleh beberapa faktor :

Faktor Internal

- a. Berawal dari karakter anak
- b. Lingkungan keluarga

Faktor Eksternal

- a. Lingkungan luar
- b. Teknologi informasi
- c. Budaya

Adanya kebijakan PERGUB No. 85 tahun 2018 tentang UPT daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berfokus kepada UPT Marsudi Putra Surabaya yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan maksud dari perlindungan sosial adalah tindakan melindungi masyarakat yang rentan dari kesejahteraan

sosial Ini termasuk anak-anak yang terlantar dan bermasalah dengan hukum. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti pengangguran, pecandu narkoba, dan orang yang terlibat dalam kejahatan.

Pengertian perlindungan tidak hanya untuk menjaga namun dnegan tanggung jawab dengan memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mencegah terjadinya ancaman terhadap anak. UPT Marsudi Putra Surabaya harus dapat memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak nakal, serta mengambil tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam memberikan dukungan dan pemantauan terhadap anak nakal di UPT.

Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk membantu anak yang bermasalah sosial kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang berguna dan dapat bertanggung jawab proses rehabilitasi ini seperti layanan konseling, pelatihan kerja, dan program pengobatan untuk pecandu narkoba.(Meitasari & Kurniawan, 2021)

UPT Marsudi Putra Surabaya memegang peran penting dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dikarenakan bertanggung jawab untuk melaksanakan

program pembinaan dan sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memastikan dana bantuan sosial benar-benar tersalurkan dengan benar dan dipergunakan dengan baik oleh penerima manfaat.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, UPT Marsudi Putra Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dikerahkan untuk melaksanakan program tersebut. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengenali kasus-kasus yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Hal ini dapat menghambat efektivitas dari program penerima manfaat yang telah dicanangkan sehingga terjadi ke tidak tepatan sasaran.

Permasalahan anak tersebut membuka ruang lain bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.85 Tahun 2018. Analisis penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya. Untuk mengetahui implementasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan peneliti memakai teori model Mirelle S.

Grindle (1980) yang dikutip dari Kasmad & Terbuka (2018:54-60) dengan penjelasan sebagai berikut :

Content of policy (Isi Kebijakan) terdiri dari : Interest affected (Kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Ruslinawaty (2018:55) menyatakan, “Kepentingan yang ada dalam kebijakan sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalannya”. Menurut faktor ini, kebijakan dalam prakteknya harus dapat memuaskan kebutuhan banyak orang dan secara akurat mencerminkan masyarakat luas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingan seseorang atau kelompok. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Pengalaman: Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kepentingan seseorang atau kelompok di masa sekarang. Pengalaman yang menyenangkan atau menyakitkan dapat membentuk pola pikir dan sikap terhadap suatu hal.
- b) Kondisi Sosial: Kondisi sosial seperti status ekonomi, pendidikan, dan agama juga dapat mempengaruhi kepentingan seseorang atau kelompok. Misalnya, orang yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke atas akan memiliki kepentingan yang berbeda

dengan orang yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

- c) Lingkungan: Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi kepentingan seseorang atau kelompok. Lingkungan yang mendukung atau tidak mendukung dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang atau kelompok.

Dalam hal implementasi, Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya telah melaksanakan kebijakan yang telah dirancang oleh Peraturan gubernur Jawa Timur No. 85 Tahun 2018 tentang unit pelaksanaan teknis untuk membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan Anak Nakal selaku penerima manfaat untuk memulai dan mengelola bisnis kecil secara mandiri dengan beberapa tahapan seperti pelatihan, pembinaan, kemudian pemberian bantuan modal usaha baru dan pemantauan secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam implementasi pembinaan oleh UPT Marsudi Putra Surabaya dan pemberian bantuan stimulant

sesuai dengan tolak ukur perubahan yang diinginkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dikarenakan upaya dari UPT Marsudi Putra dalam mengentaskan anak-anak yang rentan berhadapan dengan hukum berhasil membuka usaha dan hidup mandiri.

Type of benefits (Tipe Manfaat)

Dalam kebijakan grindle menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan haruslah memiliki manfaat terhadap kelompok sasarannya, pada poin ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan yang dibuat oleh gubernur memiliki dampak positif yang dapat mengubah kearah yang lebih baik dan bermanfaat dalam pengimplementasiannya. UPT Marsudi Putra Surabaya memiliki fungsi untuk berupaya Memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yang memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Peksos dan anak sebagai Penerima Manfaat dalam pelaksanaannya pihak UPT telah menjalankan tugas sesuai dengan Pergub nomor 85 Tahun 2018 prosedur yang telah disusun tersebut mendapatkan respon yang baik dari anak PM mereka sangat senang dengan adanya bantuan dari pemerintah Jawa Timur ini

dalam segi pembinaan yang diberikan secara baik dan sabar yang diterima oleh anak tersebut, membuatnya ingin tetap disini dan berharap mendapatkan pekerjaan di tempat melakukan praktik kerja.

Extent of change evisioned (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Kebijakan yang dibuat oleh gubernur jawa timur tentunya menginginkan perubahan yang besar bagi wilayah pemerintahan yang dibawahnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perubahan yang dilakukan dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang rentan nakal di daerah jawa timur.

Menurut temuan peneliti melalui pekerja sosial, diharapkan dalam hal tingkat perubahan yang diinginkan, anak-anak yang menerima bantuan pemerintah dapat memanfaatkannya dengan semangat pengembangan diri dan dukungan keluarga. Dengan rentang usia 4 hingga 5 tahun, jumlah anak penerima manfaat yang terdaftar di UPT Marsudi Putra Surabaya bervariasi.

Site of decision making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pencapaian tujuan kebijakan dapat dipengaruhi oleh lokasi pengambilan keputusan dalam kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Ketika keputusan yang diambil berhasil dengan baik, maka

tujuan dari rencana tersebut juga dapat tercapai dengan baik. Di UPT Marsudi Putra Surabaya, kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial adalah keputusan tentang kelompok sasaran implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti terdapat permasalahan dalam pengimplementasian program penerima manfaat yaitu anak-anak penerima bantuan merupakan anak yang tidak rentan nakal sedangkan anak-anak nakal yang rentan seperti anak jalanan masih banyak berkeliaran di wilayah jawa timur khususnya kota surabaya. Hal tersebut disebabkan dalam Pelaksanaan penerimaan PM hanya diberitahukan dan dibagikan kepada pondok pesantren, tidak langsung mengunjungi atau mengambil anak-anak yang benar-benar bermasalah sosial atau yang disebut anak nakal.

Tabel. Jumlah Penerima Manfaat UPT Marsudi Putra Surabaya

No.	Tahun	Latar Belakang			Total Eks Klien
		Pondok	Sekolah	Berkasus	
1.	2018	12	8	47	67 Anak
2.	2019	52	27	10	89 Anak
3.	2020	34	37	26	97 Anak

4.	2021	55	19	6	80 Anak
Jumlah					333 Anak

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti dari hasil penelitian

Tabel menunjukkan bahwa jumlah anak nakal sebagai penerima manfaat di UPT Marsudi Putra Surabaya mengalami perubahan dari awal dijalankannya kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, pada tahun 2018 program penerima manfaat difokuskan kepada anak jalanan dengan 47 anak yang memiliki latar belakang masalah namun dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah penerima manfaat meningkat bagi anak yang sekolah dan pondok, tidak semua anak yang berkasus atau memiliki latar belakang tidak baik mendapatkan bantuan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, terdapat permasalahan dalam penerimaan anak-anak yang rentan nakal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dilapangan dan penetapan keputusan yang dibuat oleh peraturan gubernur, yaitu banyaknya anak yang telah lulus dari UPT ialah anak-anak yang sekolah atau anak baik-baik bukan anak yang rentan sehingga tidak sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan pada bagian kedua pasal 80 bahwa tugas dari UPT Marsudi Putra Surabaya adalah memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal. Sehingga menyebabkan program bantuan stimulant bagi penerima manfaat ini belum tepat sasaran.

Program implementors (Pelaksana program)

Tentu dalam pelaksanaan program membutuhkan penggerak untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pemberi pelayanan bagi masyarakat. Orang-orang yang menjalankan kebijakan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan berhasil atau gagalnya kebijakan tersebut. Mereka yang menjalankan kebijakan hampir pasti akan berhasil.

Berikut status pelaksanaan program di tahap UPT Marsudi Putra Surabaya:

- 1) Membuat Rencana Operasional Kegiatan (ROK), yang akan berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Melakukan administrasi dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- 3) Menyiapkan infrastruktur untuk rehabilitasi dan pelayanan sosial.

UPT Marsudi Putra Surabaya dibimbing melalui tahapan pelayanan pekerjaan sosial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah selama tahap pelaksanaan. Konsultasi dengan pihak terkait, sosialisasi program layanan, identifikasi calon pelanggan, motivasi, seleksi, perumusan kesepakatan, dan identifikasi sarana dan prasarana layanan merupakan bagian dari evaluasi awal.

1. Pra seleksi dan seleksi
2. Pelaksanaan seleksi calon klien tahun 2022 dilaksanakan 2 kali
3. Penerimaan
4. Pra rehabilitasi
5. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (*Assessment*)

Sumber : SOP UPT Marsudi Putra Surabaya

Dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial petugas UPT Marsudi Putra Surabaya telah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimuat oleh gubernur Jawa Timur untuk penyeleksian, penerimaan dan rehabilitasi hingga pembinaan dilaksanakan oleh pegawai UPT namun untuk penerimaan bantuan melalui proposal di berikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang kemudian diserahkan oleh UPT Marsudi Putra Surabaya untuk dibelikan barang sesuai

dengan keterampilan yang diminati oleh PM

Resources committed (Sumber daya yang digunakan)

Aksesibilitas aset untuk membantu pelaksanaan strategi secara mendasar memengaruhi kemajuan pengaturan. Tentu saja, ketiadaan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan semakin mempersulit pencapaian keberhasilan. UPT Marsudi Putra Surabaya didukung SDM sejumlah 39 orang terdiri dari :

Tabel. Pegawai UPT Marsudi Putra Surabaya

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	19 Orang
2.	Pegawai Tidak Tetap	14 Orang
3.	Tenaga Kasar	2 Orang
4.	Tenaga Ahli Kesehatan	1 Orang
5.	Instruktur/Narasumber	5 Orang
Total		39 Orang

Sumber : Data Profil UPT Marsudi Putra Surabaya

Dalam pelaksanaan sumber daya yang digunakan dari segi sumber daya manusia masih kurang dikarenakan banyaknya PNS dan Pembimbing yang sedikit. Kemudian sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksana kebijakan yang meliputi, ruang poliklinik, ruang makan dan dapur, aula, kelas bengkel ,kelas las, mushola, perpustakaan tersebut masih belum bersih dan bangunan kurang layak.

Context atau Konteks kebijakan, terdiri dari :

Power, interests, and strategies of actor involved (Kekuatan, strategi actor yang terlibat)

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan melalui rencana operasional kegiatan yaitu secara mikro UPT PRSMP Surabaya dengan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tengah jalannya Implementasi perlindungan dan rehabilitasi sosial, dalam tahap ini berikut upaya yang akan dilakukan adalah Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah (Planning) dan tahap memberikan pembinaan dan bimbingan :

Institution and regime characteristics (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Dukungan lembaga dan rezim yang memerintah juga akan menentukan keberhasilan kebijakan. Dukungan ini bervariasi berdasarkan sifat pemerintahan saat ini. Kekuasaan dalam implementasi kebijakan PERGUB No.85 tahun 2018 ini berada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai pusat dari uraian tugas yang akan

dilaksanakan oleh cabang dinas unit pelaksanaan teknis yang mempunyai kedudukan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Maka dari itu unit pelaksanaan teknis Marsudi putra surabaya sebagai kepanjangan tangan Dinsos Jatim dalam Implementasi kebijakan menjalankan tugas pembantuannya untuk memberikan pelayanan sosial berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak nakal sebagai penerima manfaat dan anak berhadapan dengan hukum.

Tabel. Kepentingan yang terkait para aktor kebijakan

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Membagikan sosialisasi dan pusat pengaturan terkait program dana bantuan sosial sebagai Embrio
Polda	Mengawasi dan Mengkoordinasikan anak berhadapan dengan hukum untuk direhabilitasi
Polsek	Mengawasi dan Mengkoordinasikan anak berhadapan dengan hukum untuk direhabilitasi
Dinas PPA Kota Surabaya	Mengawasi dan Mengkoordinasikan anak berhadapan dengan hukum untuk direhabilitasi
Masyarakat	Sebagai penerima program dan ikut mendukung guna kelancaran perlindungan dan rehabilitasi sosial

Sumber : diolah oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara

Adapun dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, untuk menjalankan keputusan dan tindakan yang mempengaruhi APBN. Penyaluran bansos nontunai dilakukan melalui rekening

bank atas nama penerima manfaat, yang kemudian akan dibelanjakan oleh UPT dalam bentuk barang sesuai RAB proposal PM sehingga PM mendapatkan bantuan stimulant sesuai dengan keterampilan yang diminati.

Compliance and reponsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana)

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, tingkat kepatuhan dari pelaksana tidak seperti yang diharapkan. Penerima manfaat masih menggunakan para pekerja kasar sebagai pembimbing, selain itu, menurut jawaban para pelaksana, pelaksana kebijakan menjelaskan bahwa masih terdapat kekurangan personel sebagai pelaksana kebijakan dalam proses jalannya implementasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan kepala seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap sudah cukup dikarenakan pegawai saling melengkapi kekurangan satu sama lain dikarenakan banyaknya kekurangan pegawai negeri sipil tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dideskripsikan oleh peneliti terhadap

Implementasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di UPT Marsudi Putra Surabaya sudah berjalan dengan baik melalui Teori Mirelle S. Grindle (1980) terdapat dua model dengan faktor-faktor penelitian yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan, dengan memperhatikan perkembangan permasalahan Anak, khususnya Penerima Manfaat dalam Implementasi kebijakan dari Undang-undang Nomor 85 Tahun 2018 maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Isi Kebijakan

Kebijakan yang dibuat telah mewakili kepentingan kelompok sasaran dimana dari adanya program penerima manfaat ini memberikan hasil berupa kemandirian bagi anak-anak, dan memberikan banyak manfaat bagi anak berupa motivasi untuk berwirausaha dan perubahan perilaku, namun anak-anak yang menjadi penerima manfaat bukanlah anak yang rentan melainkan anak sekolah yang datang dengan niatan untuk memperbaiki hidup dimasa depan sehingga jangkauan untuk mengentaskan anak yang rentan nakal kurang, serta Sumber Daya Manusia dari pembimbing yang hanya terdapat 1 pembina pada masing-masing kelas keterampilan dan kurangnya sarana dan

-
- prasarana berupa gedung dan alat keterampilan.
2. Konteks Kebijakan
- UPT Marsudi Putra Surabaya memiliki strategi dalam Pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan pada saat melakukan pembinaan dan bimbingan, karakteristik UPT adalah panti sosial bagi anak nakal dan ABH terdapat keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai rezim dalam mengatur jalannya Implementasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, karena dalam melakukan pembinaan dilakukan secara langsung dilapangan para pegawai dan pembina saling membantu untuk menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak-anak penerima manfaat.
- REFERENSI**
- Alfianto, E. A. (2012). Kewirausahaan : Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat. *Heritage*, 1(2), 33–42.
- Alhawariy, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 62–81. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5171/3622>
- Carnes, C. M., Gilstrap, F. E., Hitt, M. A., Ireland, R. D., Matz, J. W., & Woodman, R. W. (2019). Transforming a traditional research organization through public entrepreneurship. *Business Horizons*, 62(4), 437–449. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.02.002>
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. *September*, 54–60.
- Mamu, A., Rakhmat, Yunus, & Allorante, A. I. (2020). Policy model implementation for village community empowerment in Wajo Regency. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 129–139.
- Mangkuto, A. R., & Widiyanto, M. K. (2019). Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1226–1231. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/2963>
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial. (n.d.). Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak

(Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan

Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*,

16(4), 244.

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16>

i4.87

Setiawan, K. (2021). Melalui Pembinaan

Kemensos, Anak-Anak Jalanan di

Mojokerto Sukses | Kementerian Sosial

Republik Indonesia. Kemensos.

<https://kemensos.go.id/melalui->

[pembinaan-kemensos-anak-anak-](https://kemensos.go.id/melalui-)

[jalanan-di-mojokerto-sukses-kelola-](https://kemensos.go.id/melalui-)

[usaha-kuliner](https://kemensos.go.id/melalui-)

Sugiyono, D. (2021). Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.

Sukarno. (2014). Kewirausahaan dan

Kesetiakawanan Sosial Nasional.

<https://www.grobogan.go.id/info/artike>

[1/553-kewirausahaan-dan-](https://www.grobogan.go.id/info/artike)

[kesetiakawanan-sosial-nasional](https://www.grobogan.go.id/info/artike)

Tanda, S. (2021). Pelayanan Perlindungan

Dan Rehabilitasi Anak Nakal Di Kota

Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*,

1(2), 136–156.

Theme, R. (2022). PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial) –

DINAS SOSIAL Kabupaten Bogor.

WordPress.

<https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks->

[pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-](https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-)

[sosial/](https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-)